



LAPORAN KINERJA TAHUN 2025

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun anggaran 2025. Laporan Kinerja ini merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029.

Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian PANRB mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, alat kendali, dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2025.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target salah satunya yaitu capaian **Indeks Desa Gender (IDG)** atau indikator terkait gender yang berada di angka **57.72** terhadap target **67.42 (BLM FIX) dalam hal ini ada beberapa kemungkinan yang terjadi yaitu** kepemimpinan perempuan di tingkat akar rumput menghadapi tantangan struktural dan budaya di beberapa wilayah (faktor social dan resistensi lokal). Perubahan indeks pada aspek sosial (seperti penurunan angka kekerasan atau pernikahan anak) tidak bisa terjadi secara instan dan sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang berada di luar kendali teknis dinas, kemudian juga bisa disebabkan karena Program peningkatan kapasitas perempuan Pelatihan Kewirausahaan) seringkali membutuhkan waktu untuk menunjukkan perubahan perilaku atau dampak ekonomi. Sehingga dampak dari intervensi program yang dilakukan sepanjang tahun 2025 baru akan terasa secara signifikan di tahun berikutnya. Capaian 57.72 yang mencerminkan *output* (jumlah pelatihan), sementara target tahun 2025 adalah 67.42 menuntut adanya *outcome* (perubahan status kesejahteraan/peran perempuan dalam pengambilan keputusan) yang membutuhkan waktu validasi lebih lama. Berdasarkan kendala ini maka dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat mengambil langkah – langkah strategis di antaranya yaitu **Penguatan Focal Point Gender**: Memberikan asistensi lebih intensif kepada pendamping desa.



Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran organisasi dan peningkatan efesiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara keseluruhan dalam mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.

Kandangan, Januari 2026
Kepala Dinas PPKBPPPA

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned above the printed name.

HERI UTOMO, S.STP, M.Si
Pembina TK. I
NIP. 198502212006021001



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 1

1.1.1 Tugas dan Fungsi..... 1

1.1.2 Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari:..... 2

1.2 Mandat dan Peran Strategis Kementerian PANRB 4

BAB II PERENCANAAN KINERJA 6

2.1 Rencana Strategis 6

2.2 Perjanjian Kinerja 2025..... 8

2.3 Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025 12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 16

3.1 Pengukuran Kinerja 20

3.2. Analisis Capaian Kinerja 22

3.2.1. Analisis kinerja untuk setiap sasaran Adalah sebagai berikut: 22

3.2.2. Perbandingan Pengukuran Kinerja Tahun 2025 Dengan Pengukuran Kinerja Tahun 2024 28

3.3. Realisasi Anggaran Dinas PPKBPPPA Tahun 2025..... 43

BAB IV PENUTUP 44



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Ahmad Yani Nomor 12, Kandangan, Hulu Sungai Selatan,
Kalimantan Selatan 71211, Telpon : (0517) 21556, Faksimile : (0517) 21556
Laman : dppkbpppa.hulusungaiselatankab.go.id, Pos-el : dinasppkbpppahss@gmail.com

SURAT PERNYATAAN

Nomor :
Perihal : **PERNYATAAN TELAH DIREVIU INSPEKTORAT KAB. HSS**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Heri Utomo, SSTP, MSi
NIP : 198502212006021001
Jabatan : Kepala Dinas PPKBPPPA Kab. HSS

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. **Laporan Kinerja (LKj)** Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 telah disusun secara objektif dan akuntabel.
2. Laporan Kinerja tersebut **TELAH DIREVIU** oleh **Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan** untuk memastikan keandalan informasi kinerja yang disajikan dan kesesuaiannya dengan perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan.
3. Seluruh perbaikan dan saran yang diberikan oleh tim reviu Inspektorat telah kami tindak lanjuti sebagai bagian dari upaya peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
4. Demikian pernyataan ini dibuat untuk memenuhi persyaratan pelaporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kandangan, Januari 2026

Kepala Dinas PPKBPPPA

HERI UTOMO, S.STP, M.Si
Pembina TK. I
NIP. 198502212006021001

****IKHTISAR EKSEKUTIF**

Laporan Kinerja Kementerian Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2025 memiliki dua sasaran strategis dengan total dua indikator kinerja, dan empat target kinerja yang harus dicapai.

Dari hasil pengukuran realisasi terhadap empat target tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 2 target;
- 2) Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 0 target; dan
- 3) Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 1 target:

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masingmasing Sasaran Strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tujuan: Meningkatnya kualitas pengarusutamaan gender dan pembangunan Keluarga Yang Berkualitas

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	IBangga	64.05	67.7	105.7%
2	IDG	57.72	-	-

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya pengendalian laju pertumbuhan penduduk	TFR	2.28	2.30	110.96%
2	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pencapaian kualitas pembangunan manusia	IPG	89.9	90.21 (Tahun2024) Tahun2025 Belum di liris resmi BPS	100.34

Kinerja keuangan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar **Rp 10.004.965.484,00,-** atau 91,00% dari total pagu anggaran yang dapat digunakan, yaitu **Rp 11.531.673.357,00,-** Pagu anggaran yang setelah dilakukan efisiensi sebesar **Rp 10.994.752.532,00,-**

Capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Kolaborasi internal maupun dengan pemangku



kepentingan lain serta upaya inovatif sangat diperlukan untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

BAB I PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tahunan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan mandat wajib sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Peraturan ini secara tegas menggarisbawahi pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, LKj berfungsi sebagai media akuntabilitas untuk menyajikan capaian atau kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi terkait dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD. Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan disusun secara terintegrasi dengan dokumen perencanaan strategis daerah. Rangkaian ini dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 – 2029 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas periode yang sama. Kedua dokumen tersebut menjadi landasan utama dalam merumuskan tujuan, sasaran, serta pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2025. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban resmi Dinas atas realisasi pencapaian misi organisasi. Melalui dokumen ini, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengevaluasi dan memverifikasi sejauh mana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra dan Rencana Kerja Tahun 2025 berhasil dicapai, baik dari aspek keberhasilan maupun kegagalan.

1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

1.1.1 Tugas dan Fungsi

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan dasar Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Stuktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Perangkat Daerah.

Berpedoman Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Stuktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, tugas pokok Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta tugas pembantuan lainnya yang diberikan kepala daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut:

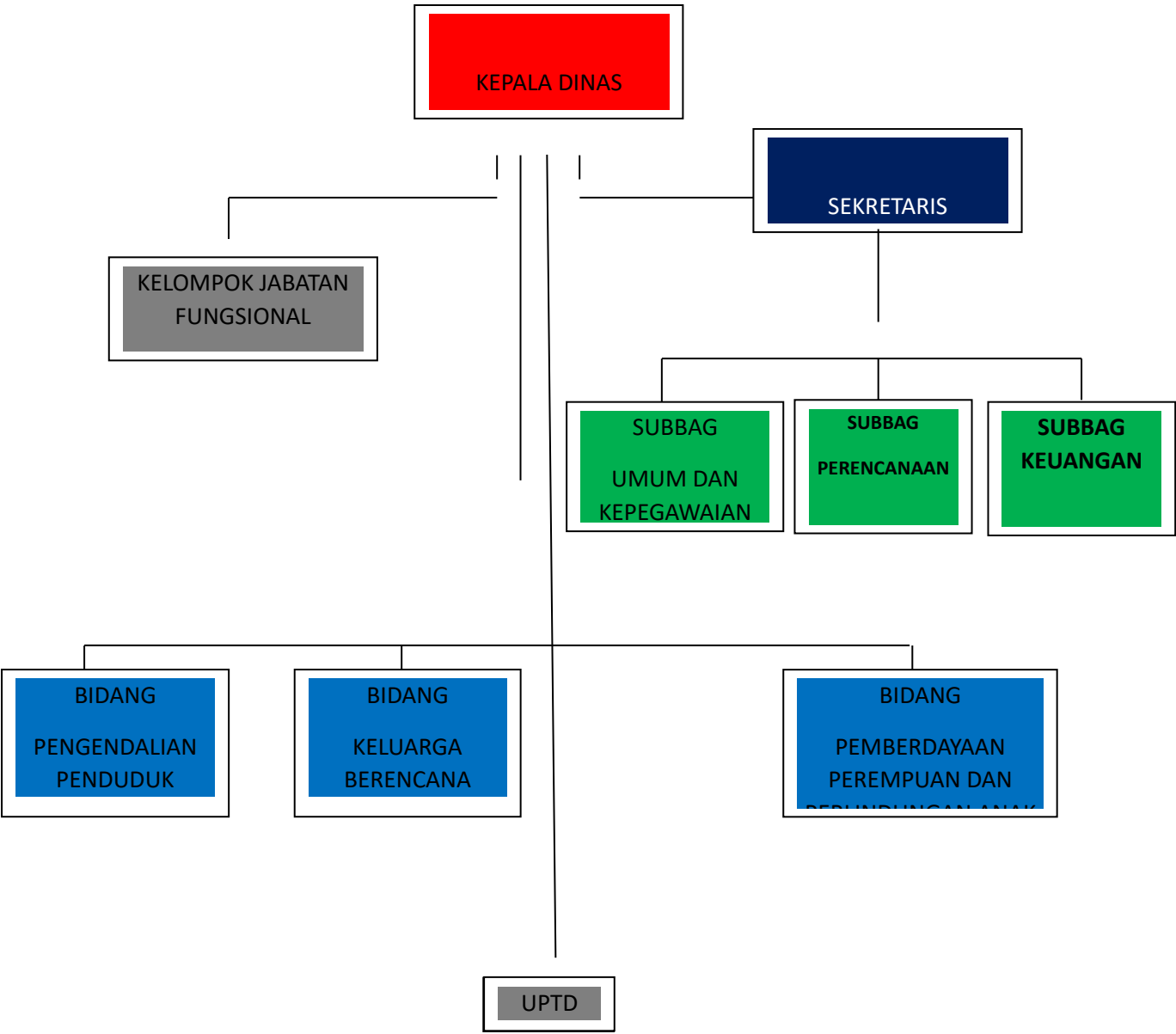
- a. penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. perumusan kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pelaksanaan kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. evaluasi dan pelaporan kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. pelaksanaan administrasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.1.2 Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari:

1. Sekretariat:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.

- 2. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera;
- 3. Bidang Keluarga Berencana;
- 4. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 5. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- 6. Jabatan Fungsional.

Adapun struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tergambar pada Gambar 1.1 di bawah ini.



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas PPKBPPPA

1.2 Mandat dan Peran Strategis Kementerian PANRB

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa perumusan permasalahan perangkat daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran perangkat daerah di masa datang.

Identifikasi permasalahan perangkat daerah dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Beberapa permasalahan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut:

1. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Minimnya ketersediaan SDM ahli di Dalduk berdampak langsung pada lambatnya perumusan kebijakan dan evaluasi program pengendalian penduduk karena beban kerja yang tidak proporsional
2. Bidang Keluarga Berencana. Masih rendahnya partisipasi pria dalam KB metode vasektomi dipengaruhi secara signifikan oleh tidak memadainya dukungan dan sosialisasi spesifik yang menargetkan kaum pria mengenai manfaat dan prosedur metode tersebut.
3. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ketersediaan petugas lapangan PPA yang masih kurang saat ini berpotensi menyebabkan penurunan kualitas dan jangkauan pelayanan program PPA di masa mendatang, terutama mengingat semakin meningkatnya kompleksitas kasus dan tantangan di lapangan

Dari permasalahan tersebut di atas strategi pembangunan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah:

1. Optimalisasi Peran PKB/PLKB Memperkuat peran Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) atau Petugas Lapangan KB (PLKB) sebagai pengumpul data primer di lapangan.
2. Sosialisasi dan Advokasi Khusus Pria (KIE Berbasis Gender): Merancang program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang spesifik dan persuasif, menargetkan tokoh masyarakat, pemimpin agama, dan kelompok pria tentang manfaat vasektomi sebagai bentuk tanggung jawab ayah dan suami.
3. Penyediaan Layanan Kontrasepsi Pria yang *Accessible*: Memperkuat jejaring fasilitas kesehatan (Faskes) yang menyediakan layanan vasektomi dengan

petugas yang terlatih, serta mengadakan kegiatan safari/pelayanan KB gratis yang secara khusus mempromosikan dan memfasilitasi KB Pria.

4. Penguatan Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga): Mengaktifkan Puspaga di tingkat kecamatan sebagai *platform* pencegahan dan rujukan awal, yang melibatkan kader PKK, tokoh agama, dan tokoh masyarakat..
5. MoU dengan Lembaga Non-Pemerintah: Menjalin kerjasama formal dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal, lembaga bantuan hukum gratis, dan psikolog/konselor swasta untuk menerima rujukan kasus yang membutuhkan pendampingan khusus.
6. Kemitraan Lintas Sektor: Memperkuat koordinasi dengan Kepolisian (PPA), Kejaksaan, Dinas Sosial, Baznas dan Puskesmas/RS untuk memastikan mekanisme rujukan dan penanganan kasus terpadu (*integrated service*) berjalan lancar dan cepat.
7. penambahan personel baru yang tersertifikasi dan penguatan kapasitas SDM yang sudah ada melalui pelatihan intensif, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi untuk mengurangi beban kerja administrative

Melalui strategi tersebut diharapkan mampu menjawab sasaran strategis Dinas PPKBPPPA yaitu Meningkatkan kualitas pengarusutamaan gender dan pembangunan Keluarga Yang Berkualitas melalui Indeks Pembangunan Keluarga dan Indeks Pemberdayaan Gender

1.3 Sistematika Laporan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, serta mandat dan peran strategis Kementerian PANRB.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai Renstra, Prioritas Nasional/Kabupaten, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan informasi terkait pengukuran kinerja organisasi dan analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2025, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja.

Bab IV Penutup

Berisi simpulan atas pencapaian kinerja, kendala, dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya

Lampiran

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 - 2029 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. 28 Tahun 2025. Isu strategis Perangkat daerah di tuntut untuk terus beradaptasi dan berinovasi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Hal ini memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai berbagai isu strategis yang dihadapi. Isu strategis ini adalah permasalahan fundamental yang jika tidak ditangani secara serius akan menghambat kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu identifikasi dan analisis isu strategis menjadi langkah krusial dalam Menyusun kebijakan publik yang tepat sasaran, efektif dan berkelanjutan. Isu strategis bertujuan untuk menguraikan permasalahan permasalahan utama yang menjadi fokus perhatian pemerintah daerah, Redaksi akan memaparkan isu yang relevan dengan kondisi daerah mulai dari aspek sosial, ekonomi, hingga lingkungan. Melalui pemahaman yang komprehensif terhadap isu- isu ini, di harapkan menjadi tercipta sinergi antar perangkat daerah dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan untuk bersama - sama mencari mencari solusi terbaik

Isu Strategis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGA NPD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki konfigurasi spasial sumber daya alam yang memberikan peluang besar bagi pengembangan wilayah secara terencana dan berkelanjutan . Distribusi potensi wilayah mencerminkan	1.Belum optimalnya penyediaan dan pemutakhiran dan pemanfaatan Data Pilah Gender untuk penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi kebijakan program kegiatan Perangkat Daerah 2.Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dalam bidang Politik, Hukum, Sosial, Ekonomi, dan bidang lainnya. 3.Belum optimalnya kebijakan penyelenggaraan PUG oleh Perangkat	Pengembangan ekonomi daerah dan sumber daya manusia dalam upaya peningkatan kesejahteraan Masyarakat;	Perubahan iklim dan Meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer berdampak pada kerentanan perempuan dan anak terhadap bencana, kesehatan dan sosial.	Deforestasi dan alih fungsi lahan memicu terjadinya pembatasan akses terhadap sumber daya esensial dan memperparah kemiskinan serta ketidakpastian lingkungan	Pencemaran air sungai dan lahan kritis serta penanganan limbah yang tidak standar berdampak terhadap beban kerja dan membuat keluarga lebih rentan.	Kesenjangan kualitas sumber daya manusia yang berdampak pada menurunnya pengarusutamaan gender dan pembangunan Keluarga yang berkualitas.

pemanfaatan	Daerah yang mengintegrasikan ke seluruh tujuh proses					
-------------	--	--	--	--	--	--

Tabel 2.1. Isu Strategis Perangkat Daerah

Dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berperan dalam mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan yakni:

Visi : Menuju Hulu Sungai Selatan yang Cerdas, Inovatif, Teknologis, dan Agamis (CINTA) untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat

Misi :

1	Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul. Fokus pada peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan serta kesehatan yang merata (termasuk program penurunan stunting dan perlindungan anak).
2	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas. Mendorong sektor-sektor unggulan daerah seperti pertanian, perikanan, dan UMKM melalui inovasi dan teknologi.
3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance). Mengedepankan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi, transparan, dan akuntabel (terkait dengan reviu Inspektorat dan pelaporan LKJP).
4	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Kelestarian Lingkungan Hidup. Menyediakan sarana prasarana yang mendukung aktivitas ekonomi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan sesuai dengan tata ruang.
5	Memperkuat Kehidupan Masyarakat yang Agamis dan Harmonis. Menjaga nilai-nilai kearifan lokal dan religius sebagai landasan sosial masyarakat HSS

Tabel 2.2. Misi Kabupaten Hulu Sungai Selatan

serta Tujuan Pembangunan Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2025-2029 berikut:

Tujuan: " Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Sejahtera, Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan Berlandaskan Nilai-Nilai Religius dan Kearifan Lokal."

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menetapkan empat Sasaran Strategis beserta indikator dan target yang ingin dicapai sebagaimana dalam tabel berikut:

Tujuan, sasaran dan indikator kinerja dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2025



Dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Menciptakan Kehidupan Masyarakat yang Harmoni Setara dan Inklusif	Meningkatnya kualitas pengarusutamaan gender dan pembangunan Keluarga Yang Berkualitas	iBangga	Indeks	64,05	64,20	64,35	64,50	64,65	64,80	
		IDG	Indeks	67,42	68,96	70,53	72,10	73,68	75,27	
		Meningkatnya pengendalian laju Pertumbuhan penduduk	TFR	2,28	2,27	2,26	2,25	2,24	2,23	
		Meningkatnyakesetaraan gender dalam pencapaian Kualitas pembangunan	IPG	89,90	90,00	90,08	90,14	90,16	90,20	

Tabel 2.3. Tujuan , Sasaran dan Indikator Strategis

2.2 Perjanjian Kinerja 2025

Upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2025-2029, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renstra dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditandatangani oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Bulan Maret tahun 2025.

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DRS. HENDRO MARTONO, MT**
Jabatan : **KEPALA DINAS PPKBPPPA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. SYAFRUDIN NOOR, S.E, S.Sos**
Jabatan : **BUPATI HULU SUNGAI SELATAN**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Hulu Sungai Selatan, 6 Maret 2025
Pihak Pertama



H. SYAFRUDIN NOOR, S.E, S.Sos



DRS. HENDRO MARTONO, MT
NIP. 197303091994021002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pengendalian laju pertumbuhan penduduk	TFR	2.28 %
2	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pencapaian kualitas pembangunan manusia	IPG	89.90 Indeks
3	Meningkatnya kualitas layanan Internal Perangkat Daerah	Persentase kepuasan pegawai pada layanan internal perangkat daerah	100 %

PROGRAM	ANGGARAN
2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 4.586.586.741,00
2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp 1.268.312.219,00
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rp 89.855.000,00
2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rp 864.997.636,00
2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rp 2.489.727.243,00
2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Rp 2.232.194.518,00

Hulu Sungai Selatan, 6 Maret 2025
Pihak Pertama



H. SYAFRUDIN NOOR, S.E, S.Sos



DRS. HENDRO MARTONO, MT
NIP. 197303091994021002

Gambar 2.1. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Murni

Pada Bulan Oktober 2025, Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini mengalami perubahan. Perubahan ini disebabkan:

- 1) Adanya penambahan, pergeseran, atau pengurangan anggaran pada program/kegiatan tertentu di yang secara otomatis mengubah target kinerja yang telah disepakati di awal tahun
- 2) Perjanjian Kinerja yang disusun di awal tahun 2025 mungkin masih mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) transisi. Dengan disahkannya RPJMD 2025-2029, maka target kinerja Kepala Dinas perlu disesuaikan agar selaras dengan Visi-Misi Bupati terpilih.
- 3) mutasi pejabat struktural/pergantian Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hal ini dilakukan guna memenuhi ketentuan tata kelola akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, di mana pejabat yang baru dilantik wajib menyepakati kembali target kinerja yang akan dicapai dalam sisa masa tahun anggaran berjalan.

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (perubahan) tahun 2025.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HERI UTOMO, S.STP, M.Si**
Jabatan : **KEPALA DINAS PPKBPPPA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. SYAFRUDIN NOOR, S.E, S.Sos**
Jabatan : **BUPATI HULU SUNGAI SELATAN**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



H. SYAFRUDIN NOOR, S.E, S.Sos

Hulu Sungai Selatan, 6 Oktober 2025
Pihak Pertama



HERI UTOMO, S.STP, M.Si
NIP. 198502212006021001

Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (E-SAKP)~

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pengendalian laju pertumbuhan penduduk	TFR	2.28 %
2	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pencapaian kualitas pembangunan manusia	IPG	89.90 Indeks
3	Meningkatnya kualitas layanan Internal Perangkat Daerah	Persentase kepuasan pegawai pada layanan internal perangkat daerah	100 %

PROGRAM	ANGGARAN
2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 4.095.232.538,00
2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp 1.395.956.628,00
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rp 89.855.000,00
2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rp 765.672.636,00
2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rp 2.499.870.548,00
2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Rp 2.148.165.182,00

Pihak Kedua



H. SYAFRUDIN NOOR, S.E, S.Sos

Hulu Sungai Selatan, 6 Oktober 2025
Pihak Pertama



HERI UTOMO, S.STP, M.Si
NIP. 198502212006021001

Gambar 2.2. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perubahan

Laporan kinerja ini, diuraikan berdasarkan perjanjian kinerja sebagaimana tercantum dalam Gambar 3 di atas.

2.3 Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025

Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 adalah sebesar 11.531.673.357,00 namun dalam rangka efisiensi anggaran, anggaran mengalami pengurangan sebesar 1.320.788.328,00 (11,45 %) sehingga menjadi sebesar Rp 10.745.507.465,00

Pada Rencana Kerja dan anggaran perubahan tahun 2025, terdapat penambahan anggaran kembali sebesar 249.245.067,00 sehingga menjadi Rp. 10.994.752.532,00

Rincian anggaran untuk setiap program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja organisasi adalah sebagai berikut:

NO	URUSAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU MURNI	PAGU PERGESERAN	PAGU PERUBAHAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7,998,488	3,264,800	3,264,800
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,499,388	535,800	535,800
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,861,001,740	3,861,001,740	3,395,076,186
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,999,744	904,500	904,500
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1,489,492	1,035,800	1,035,800
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1,499,996	1,005,500	1,005,500
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7,610,400	7,610,400	7,610,400
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42,433,235	19,304,335	19,304,335
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48,275,000	32,950,000	32,950,000
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19,099,688	9,322,250	9,322,250
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2,820,000	2,820,000	29,997,500
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	264,320,000	141,820,000	241,820,000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5,358,070	2,711,860	89,467,806

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	76,955,900	56,340,000	56,340,000
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	85,137,600	82,978,200	82,978,200
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	145,488,000	118,492,000	124,792,000
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13,600,000	13,600,000	23,600,000
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			-
2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	7,051,796	7,051,796	7,051,796
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	994,194,706	684,672,166	1,219,794,166
3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	89,855,000	89,855,000	89,855,000
4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	267,065,717	199,702,976	169,110,666
5	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	212,117,054	158,367,054	158,367,054
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	122,065,500	90,490,500	90,490,500
6	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	153,030,488	150,030,488	150,030,488
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	91,949,594	80,949,594	80,949,594
			Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	197,435,000	197,435,000	197,435,000

		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	88,400,000	88,400,000	88,400,000
7	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	58,245,840	46,024,340	46,024,340
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana di Sektor Lain	54,943,964	53,215,028	53,215,028
8	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	547,250,000	547,250,000	547,250,000
			Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	62,221,893	41,400,548	48,400,548
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1,102,609,000	1,102,609,000	1,102,609,000
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	133,620,000	120,470,000	170,520,000
			Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	269,341,000	269,341,000	269,341,000
			Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	41,685,350	28,750,000	28,750,000
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	333,000,000	333,000,000	333,000,000
9	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	45,168,814	37,058,314	61,558,314

			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	172,335,900	85,867,500	85,867,500
		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1,901,500,000	1,901,500,000	1,901,500,000
				11,531,673,357	10,669,137,489	11,019,525,071

Tabel 2.3. Rencana Kerja dan anggaran perubahan tahun 2025

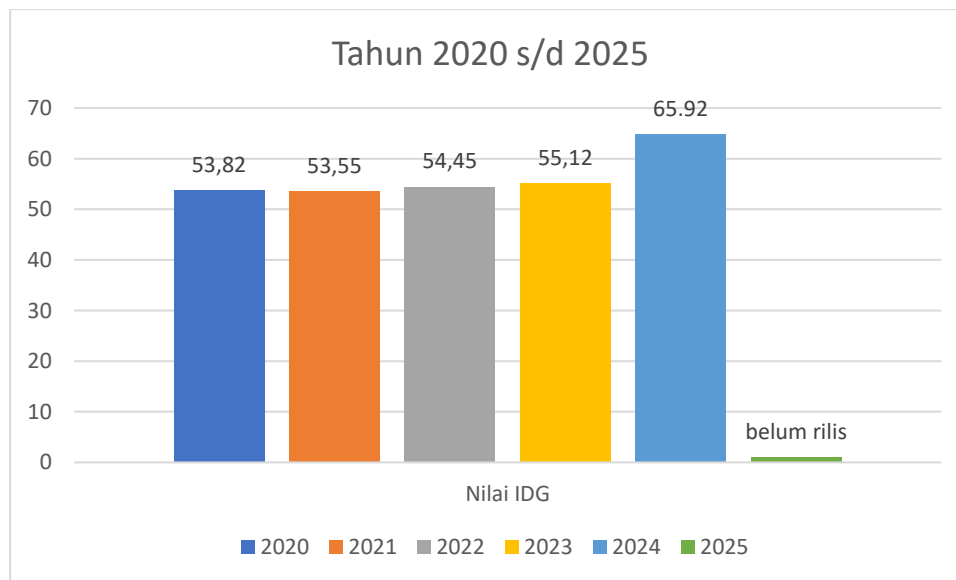
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagaimana tercantum dalam renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2025-2029, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi salah satu perangkat daerah yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yakni Tujuan "Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Sejahtera, Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan Berlandaskan Nilai-Nilai Religius dan Kearifan Lokal." dengan indikator iBangga dan IDG dan target di tahun 2025 sebesar untuk iBangga 64.05 dan IDG dengan target sebesar 57.72. Berdasarkan data dari Siga BKKBN Realisasi indikator iBangga di tahun 2025 sebesar 67.7 Realisasi ini melebihi dari target, dengan capaian sebesar 105.7%, sedangkan untuk IDG nilai realisasi dan capaian belum rilis (H+ 1 Tahun sebelumnya).

Dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya nilai iBangga sebesar 63,90, capaian tahun ini lebih tinggi dengan capaian indikator sebesar 5,95% dari capaian sebelumnya.



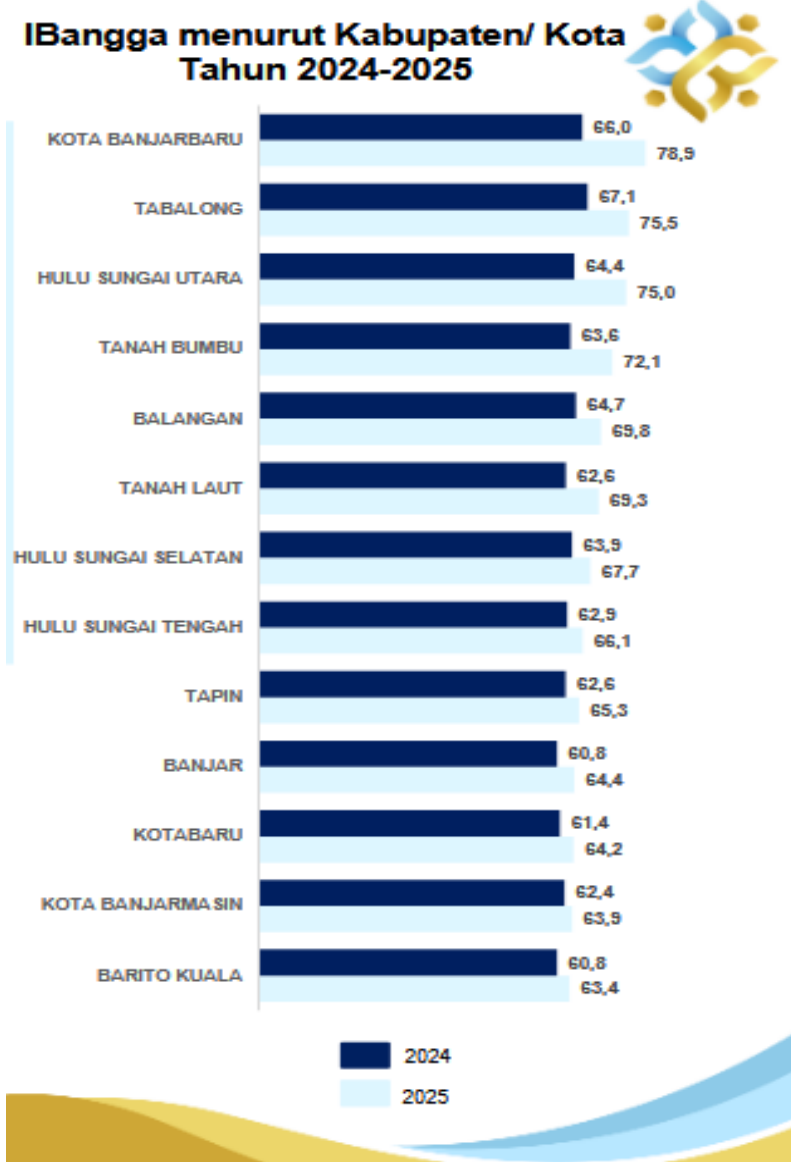
Gambar 3.1. Indeks iBangga Pemkab Hulu Sungai Selatan tahun 2020-2025



Gambar 3.2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Pemkab Hulu Sungai Selatan

Peningkatan nilai iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) dari tahun 2020 hingga 2025 menunjukkan tren yang sangat positif, bergerak dari angka 55,20 menuju 67,7. Kenaikan yang signifikan, terutama mulai tahun 2023, mencerminkan keberhasilan berbagai program pembangunan keluarga di daerah tersebut. nilai iBangga sempat mengalami sedikit penurunan dari 55,20 ke 54,98 pada tahun 2020 ke tahun 2022 hal ini kemungkinan disebabkan oleh dampak dari pemulihan pandemic covid 19 dari hal ekonomi dan sosial mengalami kemunduran sehingga berdampak kepada nilai kemandirian yang merupakan salah satu penilaian iBangga. Peningkatan nilai iBangga merupakan hasil dari langkah strategis yang secara komprehensif mengintegrasikan program Bangga Kencana dengan percepatan penurunan *stunting*, penguatan ekonomi keluarga melalui revitalisasi kelompok UPPKA, serta optimalisasi pembinaan ketahanan keluarga melalui kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL).

Capaian indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2025 tercatat sebesar 67.7, angka yang secara signifikan telah melampaui target akhir tahun RPJMD 2029 yang ditetapkan sebesar 64.65 atau 104.72%



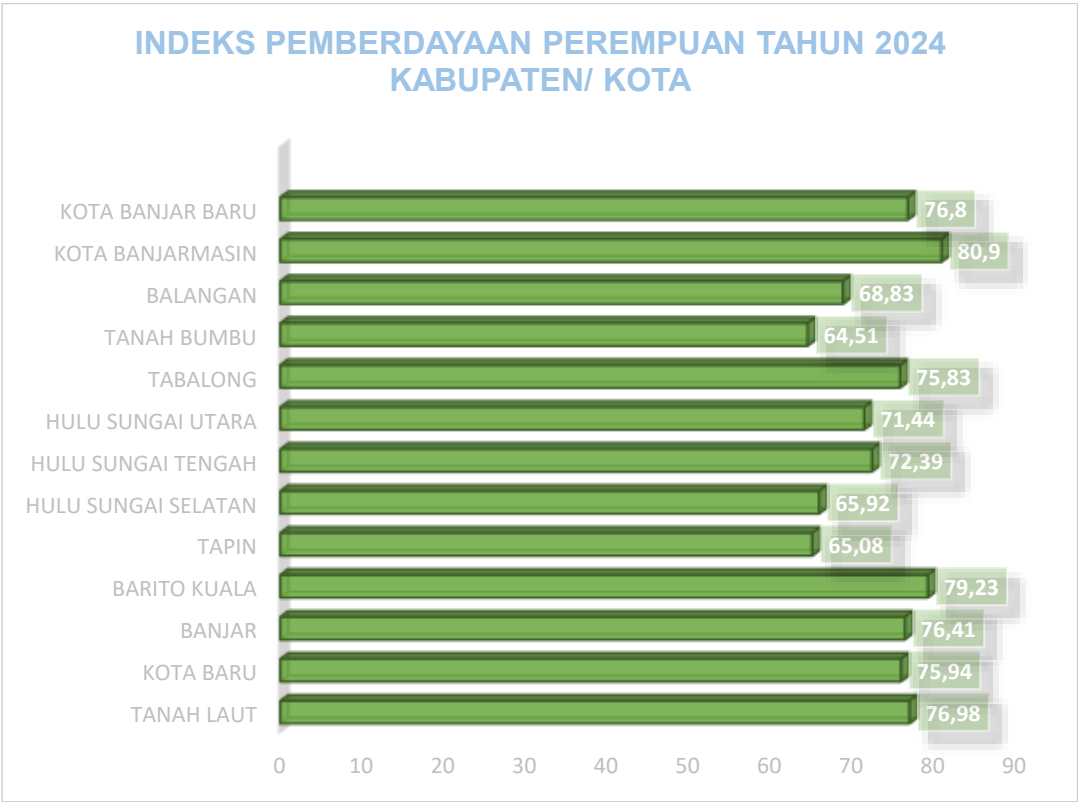
Gambar 3.3 iBangga Kabupten/Kota

Jika di bandingkan dengan kabupaten lain di provinsi kalimantan selatan maka kabupaten hulu sungai selatan menduduki nomor urut ke enam setelah kabupaten tanah laut. Secara nasional capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2025 sebesar 67,7 masih berada di bawah capaian Provinsi Kalimantan Selatan yang menyentuh angka 68,9, namun nilai tersebut secara signifikan telah berhasil melampaui target nasional yang ditetapkan sebesar 64,6.

Sedangkan untuk nilai IDG yang juga mengalami fluktuasi dan peningkatan dari tahun 2020 sampai 2025 . dari tahun 2020 ke tahun 2021 nilai IDG mengalami penurunan tipis sebesar 0,27 %. Penurunan ini juga kemungkinan besar dipicu oleh dampak pandemi covid 19 yang memukul sektor ekonomi. Secara nasional, banyak perempuan yang bekerja di sektor informal atau UMKM terdampak pembatasan aktivitas, yang kemudian menurunkan angka sumbangan pendapatan perempuan. Selain itu, fokus pemerintah yang beralih ke penanganan kesehatan darurat sedikit menghambat program pemberdayaan perempuan di lapangan. Peningkatan signifikan nilai IDG Kabupaten Hulu Sungai Selatan

menjadi 65.92 pada tahun 2024 mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memperluas keterlibatan perempuan di sektor publik, baik melalui penguatan peran di posisi pengambilan keputusan (birokrasi dan parlemen) maupun peningkatan kontribusi ekonomi tenaga profesional perempuan. Hal ini dapat di buktikan dengan adanya peningkatan jumlah anggota legislatif perempuan hasil pemilu yang mendorong nilai IDG secara tajam. Hal ini juga tidak luput dari keberhasilan Dinas PPKBPPPA dalam mengadvokasi kebijakan responsif gender yang memperluas keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di birokrasi dan parlemen, serta memperkuat kemandirian ekonomi perempuan melalui pelatihan tenaga profesional dan dukungan terhadap partisipasi aktif perempuan di sektor publik.

Meskipun data resmi BPS belum dirilis, capaian Indeks Pemberdayaan Perempuan (IDG) Hulu Sungai Selatan pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 57,72, yang berarti telah memenuhi 78,34% dari target akhir RPJMD tahun 2029 yang ditetapkan sebesar 73,68.



Gambar 3.4. IDG Kabupaten/Kota

Berdasarkan data tahun 2024 maka capaian IDG Kabupaten Hulu Sungai Selatan menduduki nomor urut ke 11 setelah kabupaten balangan, jika di bandingkan dengan target nasional tahun 2025 maka capaian Indeks Pemberdayaan Perempuan (IDG) Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada triwulan IV 2025 sebesar 57,72 menunjukkan bahwa daerah masih perlu melakukan akselerasi program secara intensif untuk mengejar target nasional tahun 2025 yang diproyeksikan berada di angka 77,00

3.1 Pengukuran Kinerja

Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2025 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun.2025. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar **96,82%** yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis. Mengacu pada Hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2025 adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya pengendalian laju pertumbuhan penduduk	TFR	2.28 %	2.30%	100,88%
2	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pencapaian kualitas pembangunan manusia	IPG	89.90 indeks	90.21 (Tahun2024) Tahun2025 Belum di liris resmi BPS	100,34%
3	Meningkatnya kualitas layanan Internal Perangkat Daerah	Persentase kepuasan pegawai pada layanan internal perangkat daerah	100%	89,25 %	Sangat puas (Skala Likert)
Rata-rata capaian					96,82%

Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja

saat ini, data resmi Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk tahun penuh 2025 secara keseluruhan belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Namun, merujuk pada data IPG Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2024 yang mencapai 90,21 dan tren pertumbuhan positif di Kalimantan Selatan maka Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2025 diproyeksikan terus mengalami peningkatan dari angka 90,21 menuju kisaran 91,00. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan semakin setara, terutama pada akses pendidikan dan kesehatan yang merata.

Berdasarkan hasil survei kuesioner dengan skala Likert yang dilakukan kepada seluruh pegawai Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, indeks kepuasan terhadap layanan internal perangkat dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatatkan nilai realisasi sebesar 89,25%. Dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 100%, maka persentase capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 89,25%. Secara kategori, nilai ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pegawai Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berada pada level '**Sangat Puas**', meskipun secara administratif target 100% belum terpenuhi sepenuhnya

Kategori	Jumlah Jawaban	Bobot	Total
Sangat Puas	144	5	720
Puas	65	4	260
Cukup Puas	29	3	87
Tidak Puas	2	2	4
Sangat Tidak Puas	0	1	0
Total Keseluruhan	240		1.071

Tabel 3.2 Tabel Capaian Kuisenior

Skor Maksimum & Minimum

- Skor Maksimum (Jika semua menjawab SP): $240 \times 5 = 1.200$
- Skor Minimum (Jika semua menjawab STP): $240 \times 1 = 240$

Persentase Persetujuan (Index %)

Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Indeks \%} = \left(\frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor Maksimum}} \right) \times 100$$

$$\text{Indeks \%} = \left(\frac{1.071}{1.200} \right) \times 100 = 89,25\%$$

Interpretasi Hasil berdasarkan kriteria standar skala Likert, angka **89,25%** berada pada kategori:

1. 0% - 19,99% : Sangat Tidak Puas
2. 20% - 39,99% : Tidak Puas
3. 40% - 59,99% : Cukup Puas
4. 60% - 79,99% : Puas
5. 80% - 100% : Sangat Puas

Kesimpulan: Secara keseluruhan, tingkat kepuasan pegawai dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berada pada kategori **“Sangat Puas”**

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap tiga indikator kinerja utama, yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG), Total Fertility Rate (TFR), dan Kepuasan Pegawai, rata - rata nilai capaian kinerja Dinas dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2025 adalah sebesar **96,82%**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui:

- 1) Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 2 target
- 2) Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 1 target.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap tiga indikator kinerja utama, yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG), Total Fertility Rate (TFR), dan Kepuasan Pegawai, rata - rata nilai capaian kinerja Dinas dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2025 adalah sebesar **96,82%**.

3.2. Analisis Capaian Kinerja

3.2.1. Analisis kinerja untuk setiap sasaran Adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pengendalian laju pertumbuhan penduduk

Capaian indikator-indikator sasaran ini adalah sebagai berikut:

No	Indikator	target	realisasi	capaian
1	TFR	2.28 %	2.30%	100,88%

Tabel 3.3 Capaian Indikator I

Berdasarkan data di atas, sasaran untuk meningkatkan pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah tercapai dengan sangat baik. Nilai **TFR (Angka Kelahiran Total)** sebesar **2,30%** dibandingkan dengan target **2,28%** menghasilkan persentase capaian sebesar **100,88%**. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah dalam mengelola tingkat kelahiran berada pada jalur yang tepat (*on track*) dan telah memenuhi standar perencanaan yang ditetapkan.

Keberhasilan melampaui target ini dipengaruhi oleh beberapa faktor strategis, antara lain:

- Efektivitas Program Keluarga Berencana (KB). Meningkatnya penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) di masyarakat.
- Perluasan Jangkauan Penyuluhan: Optimalisasi peran Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan kader di tingkat desa/Kampung KB dalam memberikan edukasi mengenai perencanaan keluarga.
- Sinergi Lintas Sektor: Adanya kolaborasi antara dinas kesehatan dan instansi terkait dalam menekan angka kelahiran yang tidak diinginkan.

Dengan tercapainya target TFR ini, dampak positif yang diharapkan adalah:

- Pengendalian Penduduk dan pertumbuhan jumlah penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi lebih terkendali, sehingga beban ketergantungan (*dependency ratio*) dapat diminimalisir.
- Peningkatan Kualitas Hidup. Keluarga memiliki ruang lebih besar untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi pada pemenuhan nutrisi dan pendidikan anak (berkaitan erat dengan penurunan risiko stunting).
- Kesejahteraan Ibu dan Anak. Jarak kelahiran yang teratur membantu menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB).

Meskipun target tercapai, terdapat beberapa tantangan yang tetap harus diwaspadai:

- Migrasi Penduduk. Arus penduduk masuk dari luar daerah yang dapat memengaruhi total laju pertumbuhan penduduk secara keseluruhan.

- b. Faktor Sosial Budaya. Adanya sebagian kelompok masyarakat yang masih memiliki hambatan budaya terhadap penggunaan alat kontrasepsi tertentu.

Rekomendasi Tindak Lanjut

- a. Mempertahankan Tren. Melanjutkan penguatan Kampung KB sebagai pusat integrasi program kependudukan di tingkat akar rumput.
 - b. Digitalisasi Data. Memperkuat sistem informasi keluarga untuk pemantauan data kelahiran secara real-time agar intervensi program lebih tepat sasaran.
 - c. Fokus pada Remaja. Meningkatkan program Generasi Berencana (GenRe) untuk mencegah pernikahan dini yang berpotensi meningkatkan angka TFR secara tidak terkendali di masa depan.
2. Meningkatnya kesetaraan gender dalam pencapaian kualitas pembangunan manusia

No	Indikator	target	realisasi	capaian
1	IPG	89.90 indeks	90.21 (Tahun2024) Tahun2025 Belum di liris resmi BPS	100,34%

Tabel 3.4. Tabel Indikator II

Indikator **Indeks Pembangunan Gender (IPG)** menunjukkan keberhasilan yang sangat signifikan. Meskipun data resmi tahun 2025 dari Badan Pusat Statistik (BPS) belum dirilis, namun jika merujuk pada realisasi tahun 2024 sebesar **90,21**, Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah berhasil mencapai dan melampaui target tahun 2025 yang ditetapkan sebesar **89,90**. Dengan persentase capaian sebesar **100,34%**, hal ini mengindikasikan bahwa akselerasi pembangunan manusia berbasis gender di Kabupaten Hulu Sungai Selatan berjalan lebih cepat satu tahun dari perencanaan semula.

Melampauinya target IPG ini dipengaruhi oleh peningkatan pada tiga dimensi dasar pembentuk indeks, yaitu:

- a. Dimensi Kesehatan yaitu Keberhasilan program kesehatan ibu dan anak yang meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH) perempuan di HSS.
- b. Dimensi Pendidikan yaitu Berkurangnya kesenjangan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) antara laki-laki dan perempuan melalui program pemerataan akses pendidikan.

- c. Dimensi Ekonomi. Peningkatan kemampuan ekonomi perempuan yang tercermin dari angka rata-rata pengeluaran per kapita perempuan yang mengalami pertumbuhan positif.

Tercapainya angka IPG sebesar 90,21 (di atas target 89,90) membawa dampak luas bagi daerah:

- a. Pengurangan Kesenjangan: Semakin kecilnya jarak antara pencapaian pembangunan manusia laki-laki dan perempuan, yang menunjukkan pembangunan di HSS semakin inklusif.
- b. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM): Kontribusi positif dari IPG secara otomatis mendorong kenaikan nilai IPM Kabupaten secara keseluruhan.
- c. Keadilan Sosial: Tercapainya rasa keadilan dalam akses terhadap sumber daya pembangunan, yang merupakan syarat utama pembangunan berkelanjutan.

Status Data: Perlu dicatat bahwa capaian 100,34% ini bersifat provisional (sementara) menggunakan basis data tahun 2024. Perlu dilakukan pemantauan berkala setelah BPS merilis angka resmi tahun 2025 untuk melakukan evaluasi final. Tantangan utama adalah mempertahankan angka IPG di atas 90, mengingat dimensi ekonomi (pendapatan perempuan) sangat fluktuatif terhadap kondisi pasar dan lapangan kerja.

Rencana Tindak Lanjut :

- a. Penguatan PUG. Melanjutkan implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di seluruh perangkat daerah melalui Anggaran Responsif Gender (ARG).
- b. Pemberdayaan Ekonomi Pasca Pandemi. Memfokuskan program pelatihan keterampilan khusus bagi perempuan kepala keluarga (PEKKA) untuk menjaga stabilitas daya beli dan pendapatan.
- c. Sinkronisasi Data. Segera melakukan koordinasi dengan BPS begitu data 2025 dirilis untuk menyesuaikan target pada dokumen perencanaan (RPJMD/RKPD) periode berikutnya agar tetap menantang (*challenging*).

3. Meningkatnya kualitas layanan Internal Perangkat Daerah

No	Indikator	target	realisasi	capaian
1	Persentase kepuasan pegawai pada layanan internal perangkat daerah	100%	89,25 %	Sangat Puas (Skala Likert)

Tabel 3.5. Indikator III

Realisasi tingkat kepuasan pegawai terhadap layanan internal perangkat daerah mencapai **89,25%**. Jika dibandingkan dengan target ambisius sebesar **100%**, maka persentase capaian kinerja indikator ini adalah sebesar **89,25%**. Berdasarkan klasifikasi skala Likert, nilai 89,25% berada pada rentang kategori "**Sangat Puas**". Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kualitas pelayanan administrasi, sarana prasarana, dan dukungan manajerial internal telah memenuhi ekspektasi mayoritas pegawai.

Hasil kategori "Sangat Puas" ini didorong oleh beberapa faktor utama:

- Digitalisasi Layanan Internal. Implementasi sistem aplikasi perkantoran yang memudahkan pegawai dalam mengurus administrasi (seperti presensi digital, sistem surat-menyurat dengan adanya srikandi dan aplikasi – aplikasi inovasi lain yang memudahkan untuk pencarian data dan lebih transparan.
- Transparansi Kebijakan. Adanya alur komunikasi yang jelas dari pimpinan terkait kebijakan internal dan pengembangan karier pegawai.
- Kenyamanan Lingkungan Kerja. Optimalisasi pemeliharaan fasilitas kantor dan penyediaan sarana pendukung yang memadai untuk menunjang produktivitas kerja hari.

Terdapat selisih (*gap*) sebesar **10,75%** dari target 100%. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mungkin menyebabkan :

- Waktu Respon (Responsiveness): Masih terdapat persepsi keterlambatan dalam penyelesaian layanan tertentu pada periode beban kerja tinggi (seperti masa pencairan tunjangan atau evaluasi kinerja akhir tahun).
- Adaptasi Sistem Baru: Munculnya kendala teknis minor pada beberapa aplikasi internal baru yang memerlukan waktu bagi pegawai untuk beradaptasi (kurva pembelajaran).

- c. Fasilitas Pendukung Non-Fisik: Kebutuhan akan kegiatan yang mendukung kesehatan mental dan keseimbangan kerja (*work-life balance*) yang belum sepenuhnya terfasilitasi secara rutin.

Dampak Capaian terhadap Organisasi

- a. Meningkatnya Loyalitas: Tingkat kepuasan yang tinggi (89,25%) berkorelasi positif terhadap rendahnya tingkat *turnover* pegawai dan meningkatnya semangat kerja tim.
- b. Efisiensi Birokrasi: Kepuasan pada layanan internal mencerminkan birokrasi yang sehat di dalam tubuh perangkat daerah, yang pada akhirnya akan berdampak pada kualitas pelayanan publik ke luar.

Tindak Lanjut untuk selanjutnya bagi dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu :

- a. Evaluasi Berkala: Melakukan survei kepuasan setiap semester untuk memantau poin-poin layanan yang mengalami penurunan nilai.
- b. Optimalisasi Helpdesk: Membentuk tim respon cepat (helpdesk) untuk menangani keluhan teknis administratif internal agar waktu tunggu layanan dapat ditekan.
- c. Pemberian Reward: Memberikan apresiasi kepada unit layanan internal dengan nilai kepuasan tertinggi untuk memotivasi peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan.

3.2.2. Perbandingan Pengukuran Kinerja Tahun 2025 Dengan Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (E-SAKIP) –



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **LOTHVIE RAHMANIE, S.STP, M.Si**
Jabatan : **KEPALA DINAS PPKBPPPA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. H. HERMANSYAH, MM**
Jabatan : **PJ. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Hulu Sungai Selatan, 2 Januari 2024
Pihak Pertama

Drs. H. HERMANSYAH, MM
NIP. -

LOTHVIE RAHMANIE, S.STP, M.Si
NIP. 198112172000121004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Keluarga	Persentase keluarga prasejahtera	30
2	Berdayanya Kelompok Rumah Tangga Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender	90.85
3	Terlaksananya Pendampingan bagi Perempuan dan Anak	Persentase perempuan dan Anak yang Mendapatkan Pendampingan	100
4	Pola Asuh Anak yang Baik/Benar di Masyarakat yang Meningkat	Persentase Sasaran Edukasi yang mendapatkan Edukasi	100
5	Meningkatnya PUS yang memenuhi syarat menggunakan MKJP	Persentase PUS yang menggunakan MKJP	8
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	80.35

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN

2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

ANGGARAN

Rp 826.299.600,00

2.08.04.2.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Rp 116.207.400,00

2.08.04.2.01.0003 - Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

Rp 116.207.400,00

2.08.04.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Rp 710.092.200,00

2.08.04.2.02.0002 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Rp 710.092.200,00

2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Rp 56.163.800,00

2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Rp 56.163.800,00

2.08.03.2.02.0001 - Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

Rp 14.950.000,00

2.08.03.2.02.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

Rp 41.215.800,00

2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Rp 13.052.000,00

2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

Rp 13.052.000,00

2.08.02.2.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota

Rp 13.052.000,00

2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Rp 433.184.200,00

2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Rp 262.664.200,00

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
2.08.07.2.02.0005 - Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 68.400.000,00
2.08.07.2.02.0006 - Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Rp 194.264.200,00
2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp 101.500.000,00
2.08.07.2.01.0004 - Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Rp 101.500.000,00
2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 69.020.000,00
2.08.07.2.03.0006 - Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Rp 69.020.000,00
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rp 85.413.700,00
2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Rp 46.311.700,00
2.14.02.2.01.0007 - Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Rp 46.311.700,00
2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 39.102.000,00
2.14.02.2.02.0015 - Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana di Sektor Lain	Rp 39.102.000,00
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA KS	Rp 2.298.805.150,00
2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Rp 2.298.805.150,00
2.14.04.2.01.0017 - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Rp 164.304.150,00
2.14.04.2.01.0008 - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Rp 16.501.000,00
2.14.04.2.01.0024 - Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Rp 2.118.000.000,00
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK PHA	Rp 163.754.100,00
2.08.06.2.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 88.197.600,00
2.08.06.2.01.0001 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 88.197.600,00
2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 75.556.500,00
2.08.06.2.02.0003 - Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 75.556.500,00
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA KB	Rp 4.829.963.050,00
2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Rp 815.222.050,00
2.14.03.2.01.0001 - Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Rp 62.222.050,00
2.14.03.2.01.0007 - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Rp 753.000.000,00



PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Rp 937.191.000,00
2.14.03.2.03.0003 - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Rp 119.100.000,00
2.14.03.2.03.0006 - Penyediaan Sarana Pemanjang Pelayanan KB	Rp 599.985.000,00
2.14.03.2.03.0011 - Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Rp 41.690.000,00
2.14.03.2.03.0008 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Rp 176.416.000,00
2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Rp 742.800.000,00
2.14.03.2.02.0004 - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Rp 742.800.000,00
2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Rp 2.334.750.000,00
2.14.03.2.04.0003 - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Rp 2.334.750.000,00
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 5.059.550.081,00
2.08.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 9.500.150,00
2.08.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 7.999.950,00
2.08.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 1.500.200,00
2.08.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 4.395.841.831,00
2.08.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 4.390.841.481,00
2.08.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp 1.500.050,00
2.08.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp 1.500.200,00
2.08.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 2.000.100,00
2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 265.025.450,00
2.08.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 4.681.200,00
2.08.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 45.576.800,00
2.08.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 45.690.000,00
2.08.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 7.517.450,00
2.08.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Baku dan Perabotan Perundang-undangan	Rp 1.560.000,00
2.08.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 160.000.000,00
2.08.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 6.725.000,00
2.08.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 6.725.000,00
2.08.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 246.309.500,00
2.08.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 0,00
2.08.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 73.293.500,00
2.08.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 173.016.000,00
2.08.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 136.148.150,00
2.08.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 118.760.000,00
2.08.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 17.388.150,00

PJ. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

Hulu Sungai Selatan, 2 Januari 2024
KEPALA DINAS PPKBPPA

Des. H. HERMANSTAN, MM
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

LOTHVIE RAHMANIE, S.STP, M.Si
NIP. 198112172000121004

4/4

07-01-2026 - 22:47:34

Gambar 3.4 Perjanjian Kinerja 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Meningkatnya Kualitas Keluarga	Persentase Keluarga Prasejahtera	Persen	30%	30%	100%
2	Pola Asuh Anak Yang Baik/ Benar di Masyarakat Yang Meningkat	Persentase Sasaran Edukasi yang Mendapatkan Edukasi	Persen	100%	100%	100%
3	Meningkatnya PUS Yang Memenuhi Syarat Menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase PUS Yang Menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	8 %	9,44%	118%
4	Berdayanya Kelompok Rumah Tangga Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	90,85%	55,12%	65.92%

5	Terlaksananya Pendampingan Bagi Perempuan Anak	Persentase Perempuan dan Anak Yang mendapatkan Pendampingan	Persen	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian Tahun 2024						95,73

Tabel 3.5. Capaian Indikator Kinerja 2024

2. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks	56,45	55,20	97,79%	60	56,40	94%	65	61,16	94,09

Sumber: Laporan kinerja tahun 2023.
Tabel 3.6. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021 s/d tahun 2023



Gambar: 3.7. Capaian Kinerja Dinas PPKBPPA tahun 2020-2025

Berdasarkan dari tabel maka dapat di analisa bahwa Dinas PPKBPPA Kabupaten Hulu Sungai Selatan selalu menunjukkan konsistensi kinerja yang sangat tinggi selama periode 2021-2025, dengan rata-rata capaian tahunan yang stabil di atas angka 94%. Pada tahun 2025, Dinas berhasil mencatatkan rata-rata capaian sebesar **96,82%**, yang merepresentasikan tren pertumbuhan positif berkelanjutan dalam tiga tahun terakhir sejak tahun 2022.

Meskipun terdapat perbedaan pada susunan indikator kinerja antara tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya sebagai konsekuensi dari penyesuaian target strategis dan perubahan dokumen perencanaan daerah fluktuasi angka tersebut tetap mencerminkan kapasitas organisasi yang adaptif. Capaian ini menegaskan bahwa Dinas

PPKBPPA mampu mempertahankan standar efektivitas kerja yang optimal dalam merealisasikan setiap target kinerja yang diamanatkan, terlepas dari dinamika perubahan indikator pembangunan gender dan kependudukan yang ditetapkan.

Setelah mengalami titik terendah pada tahun 2022 (94,00%), Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan kemampuan akselerasi yang baik dengan kenaikan bertahap hingga mencapai 96,82% di tahun 2025. Hal ini mengindikasikan perbaikan berkelanjutan dalam manajemen pelaksanaan program. Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sedangkan Nilai tertinggi pada tahun 2021 (97,79%) yang mana dapat dijadikan sebagai *benchmark* atau standar emas bagi Dinas Capaian tahun 2025 yang hampir menyentuh angka tersebut menunjukkan bahwa organisasi telah kembali ke performa puncaknya.

Berdasarkan data laporan kinerja tahun 2024 dan 2025, capaian kinerja **Dinas PPKBPPA Kabupaten Hulu Sungai Selatan** sebesar **96,82%** (data tahun 2025) atau **95,73%** (data tahun 2024) merupakan angka yang sangat kompetitif dan berada di kategori **"Sangat Tinggi"**.

Berikut adalah perbandingannya dengan daerah lain dan posisi strategisnya di Provinsi Kalimantan Selatan:

1. Perbandingan Terhadap Rata-Rata Provinsi

Secara umum, rata-rata capaian indikator kinerja urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dalduk KB) serta Pemberdayaan Perempuan di Kalimantan Selatan berada di rentang **85% - 94%**. Dengan capaian **96,82%**, Kabupaten Hulu Sungai Selatan berada di atas rata-rata kinerja provinsi.

2. Posisi Relatif dengan Kabupaten/Kota Lain (Estimasi Berdasarkan SAKIP/LPPD)

Walaupun data spesifik setiap dinas seringkali bersifat internal, kita dapat melihat perbandingannya melalui pengakuan kinerja nasional dan regional:

- **Hulu Sungai Selatan vs. Kabupaten Banjar & Tabalong:** Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Tabalong sering bersaing ketat dalam urusan pemerintahan. Capaian yang mendekati 97% menempatkannya setara dengan Kabupaten Banjar yang dikenal memiliki tata kelola administrasi sangat baik (Top 10 Nasional LPPD).
- **Hulu Sungai Selatan vs. Kota Banjarbaru:** Kota Banjarbaru unggul secara absolut pada angka *output* (seperti IPM dan Harapan Lama Sekolah), namun secara

efektivitas manajerial (kemampuan merealisasikan target sesuai anggaran), capaian 96,82% milik Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan bahwa Dinas PPKBPPPA Kabupaten Hulu Sungai Selatan lebih efisien dalam mengelola sumber daya yang ada dibandingkan beberapa dinas di daerah perkotaan yang memiliki tantangan demografi lebih kompleks.

3. Keunggulan Spesifik Dinas PPKBPPPA Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam Perbandingan

Ada beberapa area di mana Kabupaten Hulu Sungai Selatan sering mengungguli daerah lain di Kalsel:

- Penurunan Stunting. Kabupaten Hulu Sungai Selatan sering menjadi *role model* bagi kabupaten lain (seperti HST atau Balangan) karena sinergi Dinas PPKBPPPA dengan dinas kesehatan yang sangat solid.
- Pengarusutamaan Gender (PUG). Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara konsisten meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE), yang menunjukkan bahwa implementasi kinerja dinasnya bukan sekadar angka administratif, melainkan berdampak pada kebijakan daerah yang responsif gender.

4. Analisis Perbandingan Persentase

Jika dibandingkan dengan capaian tahunan daerah lain (berdasarkan tren LAKIP):

- HSS (96,82%). Kategori Sangat Tinggi (Sangat Efektif).
- Daerah lain di Banua Anam (Rata-rata 88-92%). Kategori Tinggi (Efektif).
- Daerah Pesisir (Tanbu/Kotabaru). Seringkali menghadapi kendala pada jangkauan petugas lapangan, sehingga capaian kinerja fisik seringkali berada di bawah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Capaian Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Berdasarkan analisis data kinerja dan isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBPPPA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja hingga mencapai angka 96,82%. Faktor-faktor ini dapat dibagi menjadi dua kategori: Faktor Pendorong (Kekuatan) yang mendukung tingginya capaian, dan Faktor Penghambat (Tantangan) yang perlu dimitigasi:

1. Faktor Pendorong (Mendukung Capaian Tinggi)

- a. Komitmen Tata Kelola Pemerintah Daerah) Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara konsisten masuk dalam peringkat atas nasional dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Hal ini menciptakan sistem administrasi yang tertib di Dinas PPKBPPPA, sehingga penyerapan anggaran dan pelaporan kinerja menjadi sangat efisien.
- b. Sinergi Program Penurunan Stunting. Dinas ini berperan sentral dalam koordinasi penurunan stunting. Keberhasilan) Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi rujukan penurunan stunting di Kalsel memberikan dampak positif terhadap capaian indikator kinerja utama (IKU) dinas tersebut.
- c. Adaptabilitas Perencanaan. Kemampuan dinas dalam menyesuaikan target kinerja meskipun terjadi perubahan indikator (seperti yang terlihat pada tren 2021-2025) menunjukkan fleksibilitas organisasi yang baik dalam merespon kebijakan pusat maupun daerah.
- d. Integrasi Layanan PPA. Adanya unit layanan yang terintegrasi untuk perlindungan perempuan dan anak membantu memastikan target-target terkait penanganan kasus kekerasan dapat terpenuhi secara prosedural.

2. Faktor Penghambat (Tantangan/Kendala)

Berdasarkan diskusi sebelumnya mengenai permasalahan internal, faktor-faktor berikut menjadi tantangan dalam mempertahankan atau meningkatkan kinerja:

- a. Keterbatasan SDM Ahli (Analisis Data). Minimnya SDM ahli di bidang Pengendalian Penduduk (Dalduk) menghambat kecepatan perumusan kebijakan yang berbasis data (*evidence-based policy*). Beban kerja yang tidak proporsional pada tenaga ahli yang ada dapat menjadi risiko penurunan kualitas evaluasi.
- b. Kurangnya Tenaga Lapangan PPA. Meningkatnya kompleksitas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak sebanding dengan jumlah petugas lapangan. Hal ini berpotensi menurunkan kualitas pendampingan jika terjadi lonjakan kasus di masa depan.
- c. Hambatan Kultural pada Program KB. Rendahnya partisipasi pria dalam KB metode Vasektomi (MOP) masih menjadi faktor yang menghambat pencapaian target peserta KB baru secara maksimal. Hal ini dipengaruhi oleh stigma sosial dan kurangnya sosialisasi yang spesifik menyasar kaum pria.
- d. Luas Wilayah dan Aksesibilitas. Meskipun) Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak seluas kabupaten di pesisir, jangkauan ke daerah-daerah pedesaan untuk memastikan program pemberdayaan perempuan menyentuh akar rumput tetap memerlukan sumber daya transportasi dan komunikasi yang besar.

3. Faktor Eksternal

- a. Dukungan Anggaran. Fluktuasi anggaran baik dari APBD maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik sangat mempengaruhi intensitas kegiatan sosialisasi dan operasional petugas di lapangan.
- b. Perubahan Indikator Nasional. Adanya penyesuaian indikator kinerja dari kementerian terkait (KemenPPPA atau BKKBN) menuntut dinas untuk selalu melakukan re-orientasi program agar tetap selaras dengan target nasional.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

1. Meningkatnya pengendalian laju pertumbuhan penduduk

No	Indikator	target	realisasi	capaian
1	TFR	2.28 %	2.30%	100,88%

Berdasarkan data kinerja tahun 2025, Dinas PPKBPPA Kabupaten Hulu Sungai Selatan mencatatkan keberhasilan yang sangat baik pada indikator **Total Fertility Rate (TFR)**. Dengan target sebesar **2,28%** dan realisasi sebesar **2,30%**, maka persentase capaian kinerja indikator ini adalah **100,88%**. Angka ini menunjukkan bahwa program pengendalian penduduk melalui pengaturan angka kelahiran rata-rata wanita usia subur telah berjalan efektif dan melampaui target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan melampaui target TFR ini didorong oleh beberapa faktor strategis di lapangan, antara lain:

- a. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB. Adanya perluasan layanan KB hingga ke tingkat desa dan daerah terpencil di HSS, yang memudahkan pasangan usia subur (PUS) untuk mendapatkan alat kontrasepsi secara gratis dan berkualitas. (Faktor Internal)
- b. Efektivitas Program Bangga Kencana. Keberhasilan sosialisasi program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang masif, sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perencanaan keluarga.(Faktor Internal)
- c. Optimalisasi Peran Penyuluh KB dan Kader. Kinerja proaktif dari Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan kader di tingkat akar rumput dalam melakukan pendampingan serta KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) secara *door-to-door*. (Faktor Internal)

- d. Kolaborasi Lintas Sektor. Adanya sinergi yang kuat antara Dinas PPKBPPA dengan fasilitas kesehatan (Puskesmas/RSUD) serta tokoh masyarakat/agama dalam memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi dan pencegahan pernikahan dini.(Faktor Eksternal)
- e. Pemanfaatan Data Akurat: Penggunaan data mikro keluarga yang akurat memungkinkan intervensi program dilakukan secara tepat sasaran pada wilayah-wilayah yang memiliki angka kelahiran tinggi. (Faktor Eksternal)

2. Meningkatnya kesetaraan gender dalam pencapaian kualitas pembangunan manusia

No	Indikator	target	realisasi	capaian
1	IPG	89.90 indeks	90.21 (Tahun2024) Tahun2025 Belum di liris resmi BPS	100,34%

Capaian kinerja Dinas PPKBPPA Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk indikator **Indeks Pembangunan Gender (IPG)** pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat positif dengan persentase capaian sebesar **100,34%**. Meskipun data resmi tahun 2025 dari BPS belum dirilis secara final, berdasarkan proyeksi dan data antara, indeks yang diraih mencapai **90,21** dari target sebesar **89,90**. Pencapaian di atas 100% ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memperkecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di berbagai dimensi dasar.

Keberhasilan melampaui target IPG di Kabupaten Hulu Sungai Selatan didorong oleh beberapa faktor kunci sebagai berikut:

- a. Peningkatan Akses Pendidikan Perempuan. Keberhasilan program wajib belajar sehingga angka partisipasi sekolah perempuan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan semakin meningkat dan mendekati angka partisipasi laki-laki. (Faktor Eksternal)
- b. Peningkatan Derajat Kesehatan. Penurunan angka kematian ibu dan peningkatan akses layanan kesehatan reproduksi yang memadai di seluruh kecamatan, yang berdampak langsung pada variabel umur harapan hidup perempuan. (Faktor Internal)
- c. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan. Efektivitas program pelatihan kewirausahaan dan dukungan permodalan bagi kelompok usaha perempuan/industri rumahan,

yang meningkatkan kontribusi pendapatan perempuan dalam ekonomi keluarga.
(Faktor Internal)

- d. Penguatan Pengarusutamaan Gender (PUG). Komitmen kuat dari Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mengimplementasikan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). (Faktor Eksternal)
- e. Kesadaran Masyarakat. Meningkatnya pemahaman masyarakat serta tokoh agama di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengenai pentingnya peran perempuan dalam pembangunan, sehingga partisipasi publik perempuan meningkat secara signifikan. (Faktor Eksternal)

5.3. Meningkatnya kualitas layanan Internal Perangkat Daerah

No	Indikator	target	realisasi	capaian
1	Persentase kepuasan pegawai pada layanan internal perangkat daerah	100%	89,25 %	Sangat Puas (Skala Likert)

Pada tahun 2025, sasaran untuk "Meningkatnya Kualitas Layanan Internal Perangkat Daerah" yang diukur melalui indikator **Persentase Kepuasan Pegawai** mencapai realisasi sebesar **89,25%** dari target yang ditetapkan sebesar **100%**. Meskipun secara kuantitatif belum mencapai target maksimal, berdasarkan pengukuran **Skala Likert**, predikat kualitas layanan tetap berada pada kategori **"Sangat Puas"**. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas aparatur di Dinas PPKBPPA merasa kebutuhan administratif, sarana prasarana, dan dukungan manajerial internal telah terpenuhi dengan sangat baik.

Meskipun tidak mencapai 100%, angka 89,25% merupakan pencapaian yang tinggi yang didorong oleh beberapa faktor:

- a. Digitalisasi Administrasi Internal. Penerapan sistem tata kelola persuratan dan administrasi kepegawaian berbasis digital seperti link penomoran surat masuk, surat keluar, surat order), Aplikasi Srikandi, Penggunaan Tanda Tangan Elektronik yang mempercepat proses layanan mandiri bagi pegawai.



- b. Transparansi Kebijakan Internal. Adanya komunikasi yang terbuka antara pimpinan dan staf terkait pembagian tugas, penilaian kinerja, dan penyusunan anggaran kegiatan.
- c. Peningkatan Sarana Kerja. Penataan ruang kantor dan penyediaan fasilitas pendukung yang lebih representatif, sehingga menciptakan kenyamanan dalam bekerja.
- d. Budaya Kerja yang Humanis. Terciptanya lingkungan kerja yang kolaboratif dan suportif di lingkungan Dinas PPKBPPA Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang memperkuat motivasi kerja pegawai.

Beberapa faktor yang mungkin menyebabkan belum tercapainya target 100% antara lain:

- a. Beban kerja yang fluktuatif (terutama pada periode pelaporan nasional).
- b. Keterbatasan anggaran untuk pengembangan kompetensi pegawai secara menyeluruh.
- c. Beberapa kendala teknis pada infrastruktur IT yang kadang menghambat kecepatan layanan internal.

Solusi alternative atau rencana tindak lanjut untuk menutup celah (gap) sebesar **10,75%** agar mendekati target 100% di masa mendatang, berikut adalah solusi alternatif yang dapat diambil:

- 1. Kotak Saran Digital (Feedback Loop). Menyediakan kanal aspirasi internal yang bersifat anonim agar pegawai dapat memberikan masukan jujur mengenai hambatan layanan internal tanpa rasa sungkan.
- 2. Reward & Recognition. Pemberian penghargaan bagi pegawai atau unit kerja internal terbaik sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka, guna meningkatkan moral kerja.
- 3. Optimalisasi Manajemen Beban Kerja. Melakukan analisis beban kerja (ABK) kembali untuk memastikan distribusi tugas yang lebih merata sehingga mengurangi risiko *burnout*.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja).

PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
---	--	--

	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana
		Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
		Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)

Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah yang dilaksanakan oleh Dinas PPKBPPA Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2025 untuk mendukung capaian kinerja secara optimal yaitu :

1. Sub Kegiatan Pemberdayaan Perempuan & Pengarusutamaan Gender (PUG)

- a. Koordinasi & Sinkronisasi PUG. Melaksanakan pendampingan penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada seluruh SKPD di HSS untuk memastikan anggaran daerah responsif gender.
 - b. Kapasitas Lembaga Layanan. Melakukan pelatihan manajemen usaha pada pemberdayaan ekonomi perempuan guna meningkatkan kemandirian finansial perempuan di pedesaan/ kecamatan – kecamatan
2. Sub Kegiatan Perlindungan Perempuan & Anak (PPA)
- a. Layanan Rujukan & Pengaduan. Mengoptimalkan fungsi UPTD PPA dalam penyediaan layanan medis, psikologis, dan hukum yang terintegrasi bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
 - b. Pencegahan KTA (Kekerasan Terhadap Anak). Melakukan advokasi ke sekolah-sekolah dan desa untuk membentuk Satgas Perlindungan Anak guna menekan angka kekerasan dan pernikahan dini.
 - c. Layanan AMPK (Anak Memerlukan Perlindungan Khusus). Koordinasi lintas sektor (Dinas Sosial, Disdukcapil, Kesehatan) untuk memastikan anak dalam kondisi khusus (disabilitas, korban bencana, dll) mendapatkan hak identitas dan pemulihan kesehatan.
3. Sub Kegiatan Pemenuhan Hak Anak (PHA)
- a. Advokasi Kebijakan Hak Anak. Mendorong penguatan Kabupaten Layak Anak (KLA) dengan menggandeng dunia usaha (CSR) dan social media untuk mengampanyekan lingkungan ramah anak.
 - b. KIE Pemenuhan Hak Anak. Sosialisasi masif mengenai konvensi hak anak melalui forum anak daerah sebagai pelopor dan pelapor (2P).
4. Sub Kegiatan Pengendalian Penduduk & Bangga Kencana
- a. Pendidikan Kependudukan. Mengintegrasikan materi kependudukan ke dalam kurikulum sekolah (Sekolah Siaga Kependudukan) untuk memberikan pemahaman isu lokal kepada generasi muda.
 - b. Rumah Data Ku (RDK). Pembentukan dan aktivasi Rumah Data di Kampung KB sebagai pusat data mikro yang digunakan untuk intervensi program kemiskinan dan stunting.
 - c. Operasional Balai Penyuluhan. Peningkatan sarana prasarana Balai KB di tiap kecamatan sebagai pusat koordinasi para Penyuluh KB dan Kader.
5. Sub Kegiatan Keluarga Berencana (KB)

- a. Peningkatan MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang). Mengadakan pelayanan KB gratis (Implan/IUD) secara rutin untuk menurunkan angka putus pakai kontrasepsi.
- b. Pelayanan KB Bergerak (Mobile). Mengoperasikan unit pelayanan KB keliling (MUPEN/Bus KB) untuk menjangkau wilayah pelosok/pegunungan yang jauh dari fasilitas kesehatan tetap.
- c. Penggerakan Kader IMP. Memberikan pembinaan dan dukungan operasional kepada kader PPKBD dan Sub-PPKBD sebagai ujung tombak penggerakan masyarakat di tingkat desa.

6. Sub Kegiatan Ketahanan & Kesejahteraan Keluarga

- a. Promosi Poktan (BKB, BKR, BKL, UPPKA, PIK-R):
 - ❖BKB (Bina Keluarga Balita): Fokus pada pola asuh untuk pencegahan stunting.
 - ❖PIK-R (Pusat Informasi & Konseling Remaja). Sosialisasi penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja (Generasi Berencana/GenRe).
 - ❖UPPKA: Memberikan bantuan alat atau modal bagi kelompok akseptor untuk meningkatkan ekonomi keluarga.
- b. Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting. Melakukan kunjungan rutin oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) kepada calon pengantin, ibu hamil, dan ibu menyusui untuk memastikan asupan gizi dan kesehatan lingkungan terjaga.

7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pencapaian indikator **TFR (100,88%)** dan **IPG (100,34%)** yang melampaui target menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya organisasi telah mencapai titik optimal. Berikut adalah rincian analisisnya:

1. Efisiensi Anggaran (Cost-Effectiveness)

- a. Optimalisasi Dana DAK & APBD. Keberhasilan ini dicapai dengan realisasi anggaran yang sangat efisien. Dinas mampu mengalokasikan dana pada kegiatan prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat (seperti pelayanan KB gratis dan sosialisasi PUG) tanpa adanya pemborosan pada biaya administratif.
- b. Sinergi Anggaran Lintas Sektor. Efisiensi tercipta melalui kolaborasi anggaran dengan desa (Dana Desa) untuk operasional Kampung KB dan Rumah Data, sehingga beban APBD Kabupaten dapat ditekan namun *output* tetap maksimal.

2. Efisiensi Sumber Daya Manusia (SDM)

- a. Multitasking & Produktivitas Tinggi. Meskipun jumlah personil terbatas, SDM (Penyuluh KB, Kader IMP, dan Tim Pendamping Keluarga) menunjukkan produktivitas tinggi. Satu orang petugas mampu mengelola beberapa sub-kegiatan sekaligus (misalnya, pendampingan stunting dibarengi dengan KIE alat kontrasepsi).
- b. Pemanfaatan Kader Lokal. Penggunaan tenaga sukarela/kader di tingkat desa mengurangi kebutuhan akan penambahan pegawai tetap, sehingga rasio antara jumlah petugas dan jumlah masyarakat yang dilayani menjadi sangat efisien.

3. Efisiensi Sarana dan Prasarana (Sarpras)

- a. Optimalisasi Balai Penyuluhan & Mobil Pelayanan. Penggunaan Balai Penyuluhan Bangga Kencana sebagai pusat koordinasi multifungsi (tempat rapat, gudang alokon, dan pusat data) meminimalkan kebutuhan akan sewa tempat atau pembangunan gedung baru.
- b. Digitalisasi Data. Pemanfaatan aplikasi digital dalam pengumpulan data (seperti Rumah Data Ku) mempercepat arus informasi dari desa ke kabupaten tanpa memerlukan banyak berkas fisik (paperless), yang secara langsung menghemat biaya alat tulis kantor (ATK).

4. Efisiensi Waktu (Time Management)

- a. Ketepatan Jadwal Pelaksanaan. Sub-kegiatan dilakukan secara terjadwal dan terintegrasi. Sebagai contoh, pelayanan KB bergerak dilaksanakan bertepatan dengan momentum hari besar atau pasar desa, sehingga dalam satu waktu dapat menjangkau sasaran dalam jumlah besar (massal).
- b. Respon Cepat Layanan. Sistem rujukan layanan PPA dan pendampingan keluarga dilakukan secara *real-time* melalui koordinasi grup digital, sehingga memperpendek birokrasi dan durasi penanganan kasus di lapangan.

Aspek Efisiensi	Unsur Analisis	Uraian Keberhasilan & Dampak Efisiensi
1. Anggaran	Optimalisasi DAK & APBD	Realisasi anggaran difokuskan pada kegiatan prioritas (Pelayanan KB Gratis & Sosialisasi PUG) yang berdampak langsung ke masyarakat dengan menekan biaya administratif serendah mungkin.
	Sinergi Lintas Sektor	Kolaborasi penggunaan Dana Desa untuk operasional Kampung KB dan Rumah Data berhasil menekan beban APBD Kabupaten tanpa mengurangi kualitas <i>output</i> .

2. SDM	Multitasking & Produktivitas	Petugas lapangan (PKB, Kader IMP, TPK) mampu mengelola beberapa sub-kegiatan sekaligus, seperti integrasi pendampingan stunting dengan KIE kontrasepsi dalam satu kunjungan.
	Pemanfaatan Kader Lokal	Pemberdayaan tenaga sukarela di tingkat desa mengoptimalkan rasio pelayanan masyarakat tanpa perlu menambah beban belanja pegawai tetap.
3. Sarana & Prasarana	Optimalisasi Fasilitas	Balai Penyuluhan Bangsa Kencana difungsikan sebagai pusat koordinasi multifungsi (rapat, gudang alokon, pusat data), sehingga meniadakan biaya sewa gedung.
	Digitalisasi (Paperless)	Penggunaan aplikasi (Rumah Data Ku) mempercepat arus informasi desa-kabupaten dan secara signifikan menghemat biaya Alat Tulis Kantor (ATK).
4. Waktu	Ketepatan Jadwal	Pelaksanaan sub-kegiatan yang terintegrasi (contoh: KB Bergerak pada momen pasar desa/hari besar) memungkinkan pencapaian sasaran massal dalam satu waktu.
	Respon Cepat (Real-time)	Penggunaan koordinasi grup digital pada sistem rujukan PPA dan pendampingan keluarga memperpendek jalur birokrasi dan durasi penanganan kasus.

Capaian yang melampaui 100% pada kedua indikator strategis tersebut membuktikan bahwa Dinas tidak hanya fokus pada penyerapan anggaran, tetapi pada efektivitas hasil (*outcome*), Balai Penyuluhan Bangsa Kencana dan Rumah Data Ku di tingkat desa telah dioptimalkan fungsinya menjadi pusat koordinasi, sehingga tidak memerlukan biaya sewa gedung atau perjalanan dinas berlebih dari tingkat kabupaten ke desa sehingga aset menjadi optimal dalam hal penggunaannya. Efisiensi SDM ditunjukkan dengan kemampuan personel dalam mengintegrasikan berbagai sub-kegiatan (seperti Promosi Poktan dan Pendampingan Stunting) dalam satu kali kunjungan lapangan, sehingga menghemat waktu dan biaya operasional.

3.3. Realisasi Anggaran Dinas PPKBPPPA Tahun 2025

Nama Program / Bidang Urusan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (%)	Realisasi (Rp)
Total Dinas Pengendalian Penduduk (SKPD)	10.994.752.532	91,00%	10.004.965.484
1. Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan & PA	6.346.716.802	85,96%	5.455.905.614
Program Pengarusutamaan Gender	1.226.845.962	95,75%	1.174.689.711
Program Perlindungan Perempuan	89.855.000	64,91%	58.321.000
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	169.110.666	94,47%	159.753.000
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	248.857.554	96,86%	241.036.200
Program Perlindungan Khusus Anak	516.815.082	91,69%	473.854.540
Program Penunjang Urusan Pemerintah	4.095.232.538	81,76%	3.348.251.163
2. Urusan Bidang Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana	4.648.035.730	97,87%	4.549.059.870
Program Pengendalian Penduduk	99.239.368	95,86%	95.127.528
Program Pembinaan Keluarga Berencana	2.499.870.548	97,53%	2.438.129.680
Program Pemberdayaan & Peningkatan Kesejahteraan	2.048.925.814	98,38%	2.015.802.662

BAB IV PENUTUP

Secara keseluruhan, Dinas PPKBPPA Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan performa kinerja yang **sangat memuaskan** sepanjang tahun 2025. Dengan dukungan pagu anggaran sebesar **Rp11.531.673.357**, organisasi berhasil melampaui target-target makro yang krusial, seperti *Total Fertility Rate* (TFR) dengan capaian **100,88%** dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar **100,34%**.

Kunci keberhasilan ini terletak pada model Tata Kelola Efisien, di mana Dinas PPKBPPA Kabupaten Hulu Sungai Selatan mampu mengoptimalkan peran kader lokal dan digitalisasi data (melalui Rumah Data Ku) untuk menekan biaya operasional tanpa mengurangi kualitas layanan. Keberhasilan mencapai predikat "**Sangat Puas**" pada indeks kepuasan internal juga menjadi pondasi kuat, yang menunjukkan bahwa soliditas aparatur menjadi penggerak utama dalam keberhasilan program Bangga Kencana dan perlindungan perempuan serta anak di Bumi Antaludin.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja organisasi ke level yang lebih tinggi, Dinas PPKBPPA Kabupaten Hulu Sungai Selatan menetapkan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Transformasi Digital Terintegrasi

- a. Penguatan Big Data: Mengintegrasikan seluruh data dari Rumah Data Ku ke dalam sistem satu data kabupaten untuk mempercepat intervensi stunting dan kemiskinan ekstrem secara *real-time*.
- b. Layanan Aduan Online. Pengembangan aplikasi pelaporan kekerasan perempuan dan anak yang lebih aksesibel dan menjamin privasi korban (Anonimitas terjamin).

2. Penguatan Kemandirian Kader dan Lembaga

- a. Sertifikasi Kompetensi. Melakukan sertifikasi bagi Penyuluh KB dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk memastikan kualitas edukasi di lapangan sesuai dengan standar nasional terbaru.
- b. Kemandirian Ekonomi Perempuan. Meningkatkan skala usaha kelompok UPPKA melalui kerjasama dengan *marketplace* digital dan perbankan guna memperkuat dimensi ekonomi pada IPG.

3. Ekspansi Kolaborasi Lintas Sektor

- a. Advokasi Dunia Usaha. Mendorong sektor swasta di Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk lebih aktif terlibat dalam pemenuhan hak anak (Kabupaten Layak Anak) melalui dana CSR dan penciptaan ruang ramah anak di tempat kerja.
- b. Desa Mandiri Bangga Kencana. Memperluas cakupan Kampung Keluarga Berkualitas hingga ke tingkat desa mandiri sebagai basis utama pembangunan kependudukan.

4. Peningkatan Kualitas Layanan Internal

- a. Penyempurnaan Manajemen Beban Kerja. Menindaklanjuti angka kepuasan internal (89,25%) dengan melakukan penataan beban kerja yang lebih seimbang guna mencegah *burnout* petugas lapangan.
- b. Peningkatan Kapasitas SDM. Menyelenggarakan diklat teknis secara berkala terkait analisis gender dan penanganan hukum kasus kekerasan anak bagi aparatur dinas – dinas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Langkah masa depan Dinas PPKBPPA Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan bergeser dari sekadar Pencapaian Target Angka" menuju "Keberlanjutan Dampak (Sustainability Impact). Fokus utama adalah memastikan bahwa rendahnya angka kelahiran dan meningkatnya kesetaraan gender memberikan kontribusi langsung pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara keseluruhan.

A. LAMPIRAN

Kandangan, Januari 2026
Kepala Dinas Dinkes,PPKB

Salahuddin, S. Kep., NS., MM
Pembina Utama Muda
NIP.19660315 198603 1 007

